

**POLA PERILAKU KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH
(ANALISIS INOVASI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA)**

¹⁾ ROSSI MAUNOFA WIDAYAT ²⁾ LAHMUDIN ³⁾ NURMAWANTI

¹⁾ Tenaga Pengajar FISIPOL Univ. Muhammadiyah Mataram

^{2,3)} Mahasiswa FISIPOL Univ. Muhammadiyah Mataram

e-mail : ¹⁾ rossi_maunofa@yahoo.co.id,

²⁾ lahmudin95@yahoo.co.id

³⁾ wanti_nur@gmail.com

ABSTRAK

Selama 13 tahun terakhir ini di Indonesia telah terjadi pemekaran daerah secara besar-besaran yang menimbulkan kritik dan kecemasan di kalangan tertentu. Namun, di pihak lain ada juga yang mendukung pemekaran terutama dari daerah-daerah. Perlu diketahui, dari tahun 1999 hingga 2009, terbentuk 205 daerah baru yang terdiri atas 7 Provinsi, 164 Kabupaten, dan 34 Kota. Jumlah daerah otonom di Indonesia hingga Bulan Oktober 2009 adalah 424 buah, terdiri atas 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota.

Hal tersebut di atas terjadi juga di Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatakan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten.

Dimana pernyataan tersebut seakan selaras dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, bila dilihat dari potensi ekonomi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Utara yang keseluruhan luasnya mencapai 80.953 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 8.304 Ha atau hanya 10,26 % dari keseluruhan lahan, lahan bukan sawah (tegalan, kebun) seluas 43.371 Ha atau 53,57 % dan lahan bukan pertanian seluas 29.293 Ha atau 36,18 %. Bila dicermati data diatas seharusnya dapat memberikan gambaran bahwa dari sisi potensi ekonomi ternyata Kabupaten Lombok Utara sangat menjanjikan untuk bisa menjadi daerah dengan tingkat penghasilan daerah yang tinggi. Oleh karena itu pemberlakuan kebijakan desentralisasi politik dan Otonomi Daerah pasca rejim otokratik Soeharto menjadi kesempatan politik bagi pemerintah di ranah lokal seperti halnya di Kabupaten Lombok Utara agar dapat mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan konteks sosial-kultural mereka. Dalam hal ini pemerintah daerah baik di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota seperti halnya Kabupaten Lombok Utara agar lebih dituntut memiliki inisiatif kreativitas dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, sehingga tidak lagi harus tergantung secara ekonomi maupun politik kepada pemerintah Pusat, serta diharapkan melibatkan peran serta beragam stakeholders yang mengakar di dalam berbagai komunitas pada setiap proses pembangunan. Secara teoritis, banyak asumsi-asumsi yang membuat makna pentingnya inovasi di pemerintahan. Selain itu, munculnya isu untuk mencapai standar kemampuan bermain dalam kompetisi atau daya saing daerah dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadikan pentingnya arah inovasi bagi pemerintah. Dalam hal ini, maka penelitian ini akan banyak melihat dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : Otonomi daerah, Inovasi, Perilaku Kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Pemekaran daerah era reformasi erat kaitannya dengan dua faktor utama yaitu ; 1). keterbukaan dan demokrasi pasca Soeharto 2) Kebijakan pemerintah yang bergeser dari sentralisasi ke desentralisasi. Pemekaran daerah era reformasi bersifat *bottom-up*, dimulai dari aspirasi elit-elit daerah atau kelompok-kelompok masyarakat. Terdapat kecendrungan kuat bahwa pembentukan suatu daerah baru di era reformasi hampir selalu diawali dengan pembentukan suatu panitia atau tim yang beranggotakan elit-elit local, dilanjutkan dengan penggalangan massa sebelum akhirnya menyampaikan proposal pemekaran kepada Pemerintah Pusat melalui DPR, Depdagri, atau DPD. (Jurnal Ilmu Politik, 2010 : 54)

Hal tersebut juga memberikan alur cerita yang sama terhadap awal mulanya terbentuknya Kabupaten Lombok Utara, dimana seiring dengan terjadinya perkembangan yang menuntut pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang maksimal tercetus keinginan sebagian

besar warga masyarakat Kabupaten Lombok Barat bagian Utara untuk mengusulkan pemekaran Kabupaten Lombok Barat bagian Utara menjadi Kabupaten Lombok Utara. Alasan pemekaran Kabupaten ini adalah dalam rangka percepatan pembangunan dan pendekatan pelayanan masyarakat yang mana dengan dipindahkannya Ibukota Kabupaten Lombok Barat di Gerung berimplikasi pada semakin jauhnya jarak tempuh masyarakat Lombok Barat bagian utara ke pusat pemerintahan Kabupaten. Perjuangan pembentukan Kabupaten Lombok Utara yang menjadi harapan seluruh Masyarakat Lombok Utara akhirnya terwujud dengan diundangkannya “*Undang undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara*”.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara, bila dilihat dari potensi ekonomi Kabupaten Lombok Utara berdasarkan penggunaan lahan di Kabupaten Lombok Utara yang keseluruhan luasnya mencapai 80.953 Ha, terdiri dari lahan sawah seluas 8.304 Ha atau hanya 10,26 % dari keseluruhan lahan, lahan bukan sawah (tegalan, kebun) seluas 43.371 Ha atau 53,57 % dan lahan bukan pertanian seluas 29.293 Ha atau 36,18 %. (Profil Daerah Kabupaten Lombok Utara, 2012 : 10)

Bila dicermati data di atas seharusnya dapat memberikan gambaran bahwa dari sisi potensi ekonomi ternyata Kabupaten Lombok Utara sangat menjanjikan untuk bisa menjadi daerah dengan tingkat penghasilan daerah yang tinggi. Oleh karena itu pemberlakuan kebijakan desentralisasi politik dan Otonomi Daerah pasca rejim otokratik Soeharto menjadi kesempatan politik bagi pemerintah di ranah lokal seperti halnya di Kabupaten Lombok Utara agar dapat mengembangkan potensi daerahnya berdasarkan konteks sosial-kultural mereka. Berbagai pemerintah daerah baik di wilayah provinsi maupun wilayah kabupaten/kota seperti halnya Kabupaten Lombok Utara agar lebih dituntut memiliki inisiatif kreativitas dan inovatif dalam mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah, sehingga tidak lagi harus tergantung secara ekonomi maupun politik kepada pemerintah Pusat, serta diharapkan melibatkan peran serta beragam stakeholders yang mengakar di dalam berbagai komunitas pada setiap proses pembangunan. Secara teoritis, banyak asumsi-asumsi yang membuat makna pentingnya inovasi di pemerintahan. Selain itu, munculnya isu untuk mencapai standar kemampuan bermain dalam kompetisi atau daya saing daerah dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat yang menjadikan pentingnya arah inovasi bagi pemerintah.

Rumusan Masalah

Dari penjelasan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Sejauhmana inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan melihat dari tujuan yang ingin dicapai bagi masyarakat Kabupaten Lombok Utara ?
2. Sejauhmana dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap inovasi yang dalam mengembangkan daerah dilihat dari potensi dan kemampuan daerah ?
3. Apakah ada kendala yang ditimbulkan dari inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dianalisis kualitatif (Koentjaraningrat, 1986 : 29, Moleong 2011 : 4). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai akhir Juli 2016 di Kabupaten Lombok Utara, tepatnya di Pusat pemerintahan di Kecamatan Tanjung. Dengan melihat bahwa Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten yang baru saja dimekarkan sejak tahun 2008 Itu artinya Kabupaten tersebut akan menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan, apakah nantinya Kabupaten Lombok Utara bila dilihat dari statusnya saat ini dapat memberikan peluang atau beban dalam implementasinya mewujudkan *good governance*.

Data diperoleh dengan mewawancarai 15 orang narasumber, yang dalam hal ini wawancara tersebut menjadi indikator yang sangat penting karena pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan mengetahui lebih banyak tentang potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah representasi dari beberapa pejabat struktural dan masyarakat yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai tokoh yang berpengaruh di masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan menguraikan seluruh data dan fakta yang berhasil dikumpulkan dalam bentuk argumentasi yang berlandaskan pada data yang telah diperoleh melalui tehnik wawancara, dan dokumentasi.

PEMBAHASAN

Potensi Dan Inovasi Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dengan Melihat dari Tujuan Yang Ingin dicapai bagi Masyarakat Kabupaten Lombok Utara

Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang baru terbentuk dari pemekaran Kabupaten Lombok Barat. Dilihat dari kondisi alam dan iklim serta budaya masyarakat, Kabupaten Lombok Utara menggambarkan bahwa memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif bagi pengembangan dimasa depannya. Bila mengacu pada syarat dari mempunyai suatu daerah dalam hal pembangunan yang terjadi di daerahnya maka diharapkan ada salah satu yang ada yaitu ; Potensi Ekonomi, Potensi Wilayah dan Potensi Penduduk. Seperti halnya di Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki dua potensi yang dapat mengembangkan daerah ini untuk kedepannya nanti, yaitu bila dilihat dari potensi ekonomi dan potensi wilayahnya.

Potensi Perekonomian secara fisik dapat dilihat dari beberapa sektor yang membangun perekonomian yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Pada tahun 2010, aktivitas ekonomi di Kabupaten Lombok Utara didominasi sektor pertanian yang menyumbang 42,06 % kontribusi terhadap PDRB diikuti sektor perdagangan, hotel dan restoran 18,78 %; bangunan 11,77 %; jasa-jasa 10,06 %; pengangkutan dan komunikasi 6,75 %; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 6,11 %; pertambangan dan penggalian 2,78 %; industri pengolahan 1,40 % serta listrik, gas dan air bersih 0,28 %.

Pada sektor pertanian, padi sebagai tanaman pangan pokok merupakan komoditi utama yang dibudidayakan oleh masyarakat dan dibagi dalam katagori padi sawah dan padi ladang. Budidaya padi sawah tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Lombok Utara dengan luas wilayah tanam, luas panen dan produksi terbesar di Kecamatan Bayan, diikuti berturut-turut oleh kecamatan Kayangan, Gangga, Tanjung dan Pemenang. Secara keseluruhan luas panen padi sawah di Kabupaten Lombok Utara pada Tahun 2011 mencapai 11.316 Ha dengan rata-rata produksi setahun mencapai 58.30 Kw/Ha dan hasil produksi mencapai 61.567,72 ton. Dengan produktivitas padi sawah di Kecamatan Tanjung menunjukkan performa yang paling baik diantara kecamatan yang lain, sedangkan produktivitas padi yang terendah ditunjukkan di Kecamatan Pemenang yang besarnya 53.93 kw/Ha dengan hasil produksi mencapai 4.122.04 ton.

Di Kabupaten Lombok Utara, sub sektor perkebunan memegang peranan yang penting dan beberapa komoditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi, Cengkeh dan Kakao. Tanaman kelapa terdapat di sepanjang pesisir pantai mencakup areal tanam seluas 10.570 Ha, tanaman kakao seluas 2.923 Ha, Tanaman Cengkeh seluas 995 Ha dan tanaman kopi mencakup areal tanam seluas 1.302 Ha. Tahun 2010-2011 produksi kelapa mencapai total 14.639 ton menjadi 14.130 ton , kakao mencapai 959 ton menjadi 762 ton, dan kopi mencapai 639 ton menjadi 212 ton sedangkan Cengkeh dari 995 ha menghasilkan dari 140 ton menjadi 73 ton. Kemudian untuk jambu mete dengan luas tanam mencapai 13.856 ha dapat menghasilkan dari 2.283 ton menjadi 1.960 ton.

Selain sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi.

Potensi pengembangan sektor pariwisata di Pulau Lombok pada khususnya dan Propinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya terbuka lebar terlebih dengan telah beroperasinya Bandara Internasional Lombok yang mempermudah akses bagi wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke NTB. Peluang tersebut harus dapat ditangkap oleh Kabupaten Lombok Utara karena Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi pariwisata sangat besar terutama keindahan alam yang terbentang sepanjang wilayah pesisir, pulau-pulau kecil sampai dengan wilayah pegunungan.

Keindahan alam Kabupaten Lombok Utara utamanya berada di kawasan pulau-pulau kecil (3 Gili) yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan. Pulau-pulau ini selain terkenal dengan keindahan pantai juga memiliki keindahan taman bawah laut yang menjadi tujuan utama wisatawan asing dan domestik. Selain wisata pantai dan bahari, wilayah pegunungan yang menyusur sepanjang bagian tengah wilayah Kabupaten Lombok Utara juga menjadi daya tarik tersendiri dengan alam khas pegunungan yang sejuk terutama kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) yang menjadi jalur pendakian pencinta gunung baik domestik maupun asing. Wilayah pegunungan ini juga dilengkapi dengan air terjun antara lain air terjun Tiu Pupus di kecamatan Gangga, air terjun Teja di Kecamatan Kayangan, air terjun Sendang Gila dan Kelep di Kecamatan Bayan.

Dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat terhadap inovasi yang dalam mengembangkan daerah dilihat dari potensi dan kemampuan daerah.

Sejak menjadi wilayah yang berdiri sendiri yaitu dengan hadirnya Kabupaten Lombok Utara pada tahun 2008 hingga saat ini sudah ada beberapa kebijakan yang dihasilkan melalui pelibatan atau partisipasi masyarakat melalui Musrembang. Dimana hal ini dilakukan agar nantinya kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah KLU tidak bias sasaran sehingga perlu melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi warga dalam governance adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerah. Dengan dibukanya kesempatan berpartisipasi, warga menjadi lebih memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi dilingkungannya dan memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat berkontribusi untuk ikut mengatasinya.

Komunikasi yang telah terbangun dengan baik selama ini oleh Pemerintah KLU dan Masyarakat sekitar memberikan hasil yang positif terhadap perumusan kebijakan pembangunan, dimana dari hasil wawancara menunjukkan bahwa keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan yang didalamnya terdapat kebijakan, Perda, maupun program-program pemerintah adalah sebagai wujud dari kepedulian masyarakat untuk mensukseskan arah dan sasaran dari kebijakan, maupun program yang akan dibuat oleh Pemerintah KLU. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terbilang belum optimal, hal ini dikarenakan pihak pelaksana yang dalam hal ini aparat pemerintah masih kurang dalam hal sumber daya manusia dan juga prasarana yang tersedia, ini disebabkan karena usia dari Kabupaten Lombok Utara masih terbilang muda atau baru berumur \pm 8 tahun.

Memasuki pintu gerbang dari pemekaran daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Selain memiliki modal dalam hal sumber daya alam yang melimpah namun ternyata hal itu belum mampu dan bisa membawa ke arah yang telah dicita-citakan, hal ini dikarenakan kesiapan dari masyarakat dan aparat pemerintah juga harus dikedepankan terutama dalam hal mempersiapkan sumber daya manusia. Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masyarakat masih mengeluhkan beberapa hal terkait dengan sosialisasi atau keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Seperti data yang diperoleh dilapangan menunjukkan bahwa sejak menjadi Kabupaten sendiri, saat ini Pemerintah KLU masih harus lebih serius lagi memetak-metakan sekiranya potensi apa yang dapat dijadikan keunggulan daerah mengingat wilayah ini memiliki potensi ekonomi dan potensi wilayah yang sangat potensial.

Terlepas dari beberapa hambatan yang dirasakan hingga saat ini dan masih belum dapat terselesaikan, dalam hal ini Pemda akan terus berupaya dengan inovasi yang dilakukan untuk memberikan ruang atau akses yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atau kepada siapa saja yang ingin mengetahui dan memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Apalagi ketika inovasi yang dilakukan itu juga ditandai dengan maraknya penggunaan teknologi informasi dilingkungan pemerintahan atau sering dikenal dengan istilah e-Government. Yang dimana pada saat ini, Kabupaten Lombok Utara sudah dapat menggunakan teknologi berbasis internet diawal-awal pemerintahan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah pemekaran. Tentunya hal ini menjadi pemicu dan penyemangat serta inovasi, hal ini dikarenakan ada keinginan dan ruang yang telah disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat atau berbagai kalangan dapat mengawasi terhadap produk-produk kebijakan, program serta perda yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara hingga saat ini yang dimana hal ini juga dapat memberikan kritik serta saran kepada pemerintah melalui media yang telah ditentukan. Sehingga dalam pelaksanaannya lebih transparansi dan akuntabilitas yang sedikit tidak mengarah kepada konsep *good governance*.

Bila dilihat dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan atau perilaku Kepala Daerah Kabupaten KLU termasuk gaya atau perilaku kepemimpinan partisipatif. Sehingga organisasi semacam ini sangat produktif, karena pegawai memberikan dukungan bagi kemajuan organisasi. Selain itu juga dari inovasi yang terdapat di Kabupaten KLU, maka Kepala Daerah Kabupaten KLU lebih tepatnya menggunakan strategi inti (core strategy). Hal ini dikarenakan dari hasil analisa diatas Kepala Daerah yang berkinerja tinggi adalah kepala daerah yang memiliki perilaku yang mudah menetapkan sasaran secara jelas dan tepat, sehingga memudahkan jajaran birokrasi untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan Musrembang yang dilakukan sehingga menghasilkan kebijakan, atau program serta perda dari adanya kegiatan partisipasi masyarakat tersebut.

Kendala yang ditimbulkan dari inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah

Kabupaten Lombok Utara di usianya yang masih relatif muda maka wajar ketika muncul beragam persoalan dan hal ini menunjukkan bahwa nantinya beragam persoalan tersebut seharusnya dapat dimanajemen agar persoalan dapat diminimalisir dan pada akhirnya tidak muncul kembali di masyarakat Kabupaten Lombok Utara.

Saat ini yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan masih beradaptasi, baik bagi pemerintah daerah maupun masyarakat, selain itu juga masih terbatasnya sarana dan prasarana yang sedikit tidak menghambat jalannya roda pelayanan pemerintah di Kabupaten Lombok Utara. Sumber lain yang menghambat berikutnya yaitu sumber daya manusia yang dalam hal ini aparatur birokrat yang masih sangat kurang dari segi kualitas, serta keberadaan sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang pelayanan publik yang maksimal.

Sebagai perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat dan globalisasi akan mendorong terjadinya berbagai pergeseran nilai dalam organisasi pemerintah daerah. Perubahan organisasi pemerintahan daerah sebagaimana tersebut di atas tentunya harus dilandasi oleh strategi-strategi jitu yang dipandang efektif dalam membangun organisasi pemerintah daerah. Dalam hal ini kendala yang menghambat jalannya perubahan inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah, yaitu masih belum optimalnya strategi konsekuensi hal ini dikarenakan pola pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah masih terbentur dengan kelengkapan infrastuktur dan sumber daya baik sumber daya finansial (APBD) dan manusia.

Selain itu culture strategi atau budaya strategi juga menjadi kendala di dalam inovasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kinerja organisasi public pada umumnya yang disebabkan oleh kurangnya nilai-nilai dalam organisasi public yang dapat memotivasi para pegawainya untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya. Yang salah satunya bisa dilihat separuh dari jumlah aparatur birokrasi di KLU mereka lebih banyak yang berdomisili bukan di daerah KLU melainkan dari Kota Mataram dan Kab.Lombok Barat sehingga ini dapat mempengaruhi terhadap kinerja pegawainya, dikarenakan jarak tempuh tersebut dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan serta motivasi atau semangat dari pegawainya. Dan hal lainnya adalah masih ada beberapa pegawai yang kurang memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ingin dilayani sehingga jika ini masih tetap menjadi pembiaran maka akan menjadi presedent yang buruk terhadap tata kelola pelayanan yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kabupaten Lombok Utara adalah kabupaten yang baru terbentuk, setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menjadi tonggak sejarah bagi keberlangsungan Kabupaten Lombok Utara.
2. Kabupaten Lombok Utara memiliki potensi ekonomi yang cukup prospektif bagi pengembangan dimasa depannya. Dimana Kabupaten Lombok Utara sudah memiliki dua potensi yang dapat mengembangkan daerah ini untuk kedepannya nanti, yaitu bila dilihat dari potensi ekonomi dan potensi wilayahnya.
3. Di Kabupaten Lombok Utara, sub sektor perkebunan memegang peranan yang penting dan beberapa komoditinya menjadi produk unggulan daerah yaitu Kelapa, Kopi, Cengkeh dan Kakao.
4. Selain sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan juga memiliki potensi yang cukup menjanjikan. Dengan luas wilayah dan daya dukung sektor pertanian, sub sektor peternakan dapat dikembangkan secara optimal terutama pengembangan populasi dan produktivitas ternak besar yaitu Sapi sebagai dukungan terhadap program Bumi Sejuta Sapi yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.
5. Dalam melakukan inovasi melihat berbagai potensi yang terdapat di daerah, maka Kepala Daerah telah melakukan strategy inti (core strategy) hal ini dikarenakan beberapa program atau kebijakan yang menetapkan sasaran secara jelas dan tepat, hal ini juga dikarenakan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara melakukan peran aktif masyarakat atau perilaku kepemimpinan yang partisipatif terhadap masyarakat. Artinya kepala daerah mau lebih berperan aktif mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga memudahkan jajaran birokrasi untuk mencapai tujuannya.
6. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berada dalam tahap pemetaan potensi bagi daerah, hal ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat mengukur serta mengetahui berbagai potensi serta keunggulan dari masing-masing sektor, sehingga nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara.

7. Salah satu kendala yang saat ini masih menjadi hambatan di dalam mengembangkan inovasi dan kreativitas daerah di Kabupaten Lombok Utara yaitu masih belum meratanya sumber daya manusia dari aparatur birokrat.
8. Masih belum optimalnya strategi konsekunsi hal ini dikrenakan pola pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah masih terbentur dengan kelengkapan infrastuktur dan sumber daya baik sumber daya finansial dan manusia.

Saran-saran

1. Dari hasil pemetaan potensi daerah dapat dijadikan salah satu potensi yang paling diunggulkan bagi daerah, atau yang menjadi icon potensi daerah. Dan dalam hal ini komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara merupakan sebagai pemicu meningkatnya PAD, sehingga nantinya fokus terhadap potensi tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah.
2. Sumber daya alam (SDA) yang terbilang melimpah dan produktif tidak akan seimbang jika sumber daya manusianya tidak bisa dan mampu untuk mengolah SDA yang ada. Sehingga diperlukan adanya peningkatan SDM yang handal dan berkualitas. Hal ini bisa dilakukan melalui prekrutan pegawai Pemda di masing-masing SKPD, selain itu juga bisa mengirimkan pegawai di masing-masing SKPD untk melanjutkan studi lanjut (S1, S2,S3).
3. Perlunya mengubah paradigma atau budaya birokrasi yang rendah dari segi norma dan perilaku menjadi birokrasi yang lebih inovatif, memiliki etos kerja yang tinggi, menghindari bahkan sampai meniadakan KKN di jajaran pemerintah setempat di Kabupaten Lombok Utara.
4. Karena Kabupaten Lombok Utara dapat dikatakan sebagai kabupaten yang baru lahir, karena usianya baru 8 tahun, maka diperlukan adanya kerjasama, komitmen terhadap partisipasi masyarakat kepada Pemerintah Daerah KLU. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap arahan dari kebijakan atau berbagai aturan yang dibuat oleh Pemda dan dapat memecahkan berbagai permasalahan yang ada di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo, 2010. *Jurnal Ilmu Politik (Politik Lokal di Indonesia; dari Otokratik ke Reformasi Politik)*, AIPI dan Pustaka Pelajar, Jakarta
- Astuti Woro, 2009. *Meluruskan Demokrasi Lokal Menggagas Kepemimpinan Daerah yang Ideal di Era Pilkada Langsung* dalam Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik, Gaya Media, Yogyakarta
- Asyari, Sapari Imam,1983. *Metode Penelitian Sosial*, Usaha Nasional,: Usaha Naional, Surabaya
- Azwar, Saifuddin,2005. *Metode Penelitan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Brannen, Julia 2006 *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Faturrahman Agus, 2007. *Menuju Masa Depan Peradaban (Refleksi Budaya Etnik di NTB)*, Genta Press, Yogyakarta
- Haryanto, 2005. *Kekuasaan Elit*, PLOD UGM-JIP FISIPOL UGM, Yogyakarta
- Kaloh, J., 2003.*Kepala Daerah, Pola, Kegiatan, Kekuasaan dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- _____,2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Moleong, Lexy J 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Nawawi, Hadari, 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada Univerity Press, Yogyakarta
- Prihatmoko, J.Joko.,2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka pelajar, Yogyakarta
- Piliang, J.Indra, 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*, Nuansa, Bandung
- Riwo kaho,2002. *Josef Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Raja grafido Persada, Jakarta
- Sayuti, 2004. *Pergeseran Kekuasaan Pemerintah Daerah Menurut Kontitusi Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Sugiyono, 1994.*Metode Penelitian Administrasi* Alfabeta, Bandung
- Komunikasi*, 2004. Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Varma,SP 2007. *Teori politik Modern*, PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Wibawa,Fahmi, 2004. *Inovasi Sebagai Referensi (Tiga tahun Otonomi Daerah & Otonomi Award)*, JPIP, Jakarta
- Yusron, *Elite Lokal dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 2009